

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan era keterbukaan informasi mengakibatkan masyarakat semakin memodernisasi pola berpikirnya, terlihat jelas dalam perbedaan pandangan politik seiring pesatnya kemajuan teknologi yang berkembang. Ruang keterbukaan melalui teknologi informasi selanjutnya semakin memperbesar tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Hal ini ditandai dengan mudahnya sebuah isu terkait penyelenggaraan pemerintahan sampai pada tingkat masyarakat paling bawah sekalipun, terlepas salah atau benarnya isu tersebut.

Bagi penyelenggara pemerintahan, kondisi tersebut diatas, merupakan daya dorongan yang terus menerus menguat sekaligus sebagai tuntutan untuk diselenggarakannya sebuah pola pembangunan yang responsif. Proses pembangunan yang diawali dari perencanaan pembangunan harus mengutamakan pelayanan yang optimal dengan tetap memprediksi masalah-masalah dimasa yang akan datang secara tepat, guna menjaga kestabilan pemerintah serta keharmonisan dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dari pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Transparansi dapat diartikan bahwa penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.

Sedangkan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian pilar utama kekuatan negara.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat guna mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan yang komprehensif.

Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian serta tugas pembantuan, berkewajiban juga menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dengan demikian, diharapkan agar dapat ditentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Renstra Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin tahun 2014-2018. Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan struktur organisasi

perangkat daerah. Perubahan dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati Merangin Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin, dan salah satu point pentingnya adalah perubahan nama dan struktur organisasi Dinas Koperindag Kabupaten Merangin menjadi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin.

Selain perubahan nama dan struktur OPD, Pemerintah Kabupaten Merangin juga melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 Kabupaten Merangin, yang diatur melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018

Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dengan sendirinya harus pula dilakukan review dan perubahan terhadap Renstra Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Perubahan Renstra DKUKMPP Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perubahan Renstra Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin 2014-2018 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

9. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
13. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
14. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Penegembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi

- Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 07);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
 34. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 35. Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diadakannya Perubahan Renstra Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin adalah :

1. Menyiapkan dokumen rencana yang berisi Visi, Misi, Tugas, Sasaran Strategis dan Kebijakan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin yang lebih akomodatif terhadap berbagai kepentingan dan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang koperasi, perdagangan dan perindustrian sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014-2018 dapat tercapai.

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi program dan kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

b. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Renstra Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pokok, fungsi Dinas KUKMPP sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM, perdagangan dan perindustrian sesuai dengan aspirasi yang berkembang dan tuntutan masyarakat
2. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD.
3. Menyediakan satu tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin.
4. Memudahkan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program/kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4 Sistematika Penyusunan

Renstra Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin tahun 2014 – 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra OPD Dinas KUKMPP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunannya, keterkaitan Renstra OPD Dinas KUKMPP dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jambi dan dengan Renja OPD Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan perundangan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas KUKMPP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas KUKMPP.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas KUKMPP, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UMUM

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas KUKMPP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas KUKMPP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas KUKMPP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas KUKMPP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas KUKMPP ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

pembentukan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Merangin, dan hasil analisis terhadap kajian lingkungan hidup strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin pada lima tahun mendatang.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini dikemukakan tugas dan fungsi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Merangin.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

4.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DANKEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin.

4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dalam lima tahun yakni, tahun 2014 – 2018.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas KUKMPP tahun 2014 – 2018.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu, Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebelumnya bernama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau yang biasa disingkat Dinas Koperindag yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merangin.

Perubahan dari Perda Nomor 18 Tahun 2008, menjadi Perbup Nomor 38 Tahun 2016 selain merubah nama dinas juga merubah tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

a. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

2. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan Menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
3. Pengkoordinasian dan pengarahan serta pembinaan Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
5. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
6. Pelaksanaan tugas pembantuan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
7. Pelaporan dan Pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Program dan Keuangan;

3. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :
 - a) Seksi Koperasi;
 - b) Seksi Simpan Pinjam;
 - c) Seksi UMKM.

4. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - a) Seksi Sarana dan Bina Usaha;
 - b) Seksi Promosi dan Distribusi ;
 - c) Seksi Pengawasan dan Monitoring.

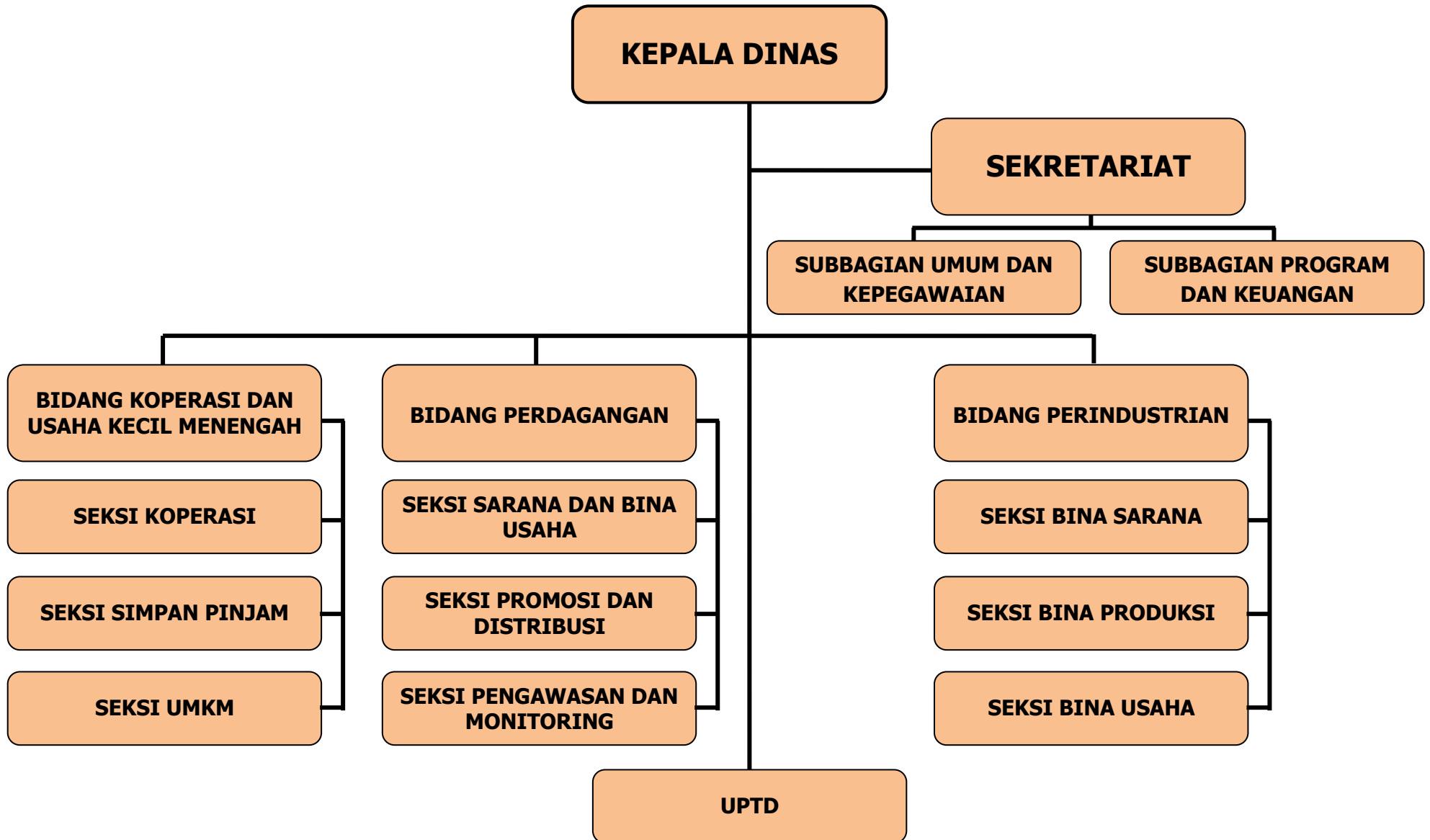
5. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - a) Seksi Bina Sarana;
 - b) Seksi Bina Produksi;
 - c) Seksi Bina Usaha.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPTD).

Secara lebih jelas, struktur organisasi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dapat dilihat dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KUKMPP KAB. MERANGIN



2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, OPD harus lah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Adapun gambaran Sumber Daya Manusia/pegawai di lingkungan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin berjumlah 75 orang dengan tingkat pendidikan sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2.1 berikut:

Tabel 2.2.1.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan							
Jenis Kepegawaian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
ASN (Aparatur Sipil Negara)	2	23	4	25	1	-	55
Tenaga Kontrak / Honorer	-	5	-	15	-	-	20
Jumlah	2	28	4	40	1		75

Adapun jumlah pegawai Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin yang memiliki jabatan struktural, fungsional, fungsional umum adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2.2 berikut :

Tabel 2.2.1.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis dan Tingkat Jabatan

Jabatan					
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah
1	4	14	11	15	55

Sedangkan berdasarkan golongan pegawai Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dapat diuraikan sebagaimana tabel 2.2.3 berikut :

**Tabel 2.2.1.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan**

Jenis Kepegawaian	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
PNS	7	33	15	-	55

2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Guna menunjang kinerja OPD, keberadaan aset dan peralatan kerja mutlak diperlukan, demikian pula halnya dengan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin. Tabel berikut menggambarkan keadaan aset dan peralatan kerja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin

**Tabel 2.2.2.1
Keadaan Aset dan Peralatan Kerja Dinas KUKMPP**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun pengadaan
1	Brankas		1995
2	Kursi Direktur		2000
3	Meja Kayu		2001
4	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Honda	2002
5	AC	Nasional	2002
6	Lemari Bupet		2003
7	Timbangan BBI 50 kg	Abadi	2006
8	Anak Timbangan 100 kg		2006
9	Televisi 21	Panasonic	2006
10	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
11	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006

12	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
13	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
14	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
15	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
16	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
17	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
18	Batu Timbangan/Anak Timbangan		2006
19	Kendaraan Roda 4 Koperindag	Toyota	2007
20	Penggiling Hasil Pertanian		2007
21	Lemari Arsip		2007
22	Lemari Arsip		2007
23	Lemari Arsip		2007
24	Kursi Putar/Kerja	Uchiwa	2007
25	Kursi Putar/Kerja	Uchiwa	2007
26	Kursi Putar/Kerja	Uchiwa	2007
27	Kursi Putar/Kerja	Uchiwa	2007
28	Kursi Putar/Kerja	Uchiwa	2007
29	Kursi Putar/Kerja	Uchiwa	2007
30	Kursi Mebeler		2007
31	Kursi Mebeler		2007
32	Kursi Mebeler		2007
33	Kursi Mebeler		2007
34	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
35	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
36	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
37	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
38	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
39	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
40	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
41	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
42	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
43	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
44	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
45	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
46	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
47	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki tander	2008
48	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki	2008
49	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Suzuki	2008
50	Mesin Tik	Royal 13	2008
51	Filing Kabinet	Top	2008
52	Filing Kabinet	Top	2008
53	Filing Kabinet	Top	2008

54	Filing Kabinet	Top	2008
55	Kipas Angin	Sakai	2008
56	Komputer	LG	2008
57	Komputer	LG	2008
58	Komputer	LG	2008
59	Lap top	Acer	2008
60	CPU		2008
61	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Honda	2009
62	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Honda	2009
63	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Honda	2009
64	Kendaraan Roda 2 Koperindag	Honda	2009
65	Timbangan Centesimal Bescule		2009
66	Timbangan Centesimal Bescule		2009
67	Timbangan Centesimal Bescule		2009
68	Karpet		2009
69	Komputer PC		2009
70	Note Book Dual Core T4200	Acer	2009
71	Note Book Dual Core T4200	Acer	2009
72	Camera Digital		2009
73	Mesin Potong Rumput	Still	2011
74	Mesin Potong Rumput	Still	2011
75	Almari Arsip		2012
76	Kursi Direktur	Fujima	2012
77	Meja Rapat Kayu		2012
78	Meja Rapat Kayu		2012
79	Meja Rapat Kayu		2012
80	Meja Rapat		2012
81	Meja Rapat		2012
82	Kipas Angin		2012
83	Sound System		2012
84	Komputer PC		2012
85	Laptop	Toshiba	2012
86	Printer	Canon	2012
87	Printer	Canon	2012
88	Printer	Canon	2012
89	Mobil Pick Up	HILUX	2013
90	Infocus	Benq	2013
91	Kipas Angin	Panasonic	2013
92	Kipas Angin	Panasonic	2013
93	Kipas Angin	Panasonic	2013
94	Kipas Angin	Panasonic	2013
95	Kipas Angin	Panasonic	2013
96	Kipas Angin	Panasonic	2013
97	Horden		2013

98	Komputer PC	SPC	2013
99	Lap top	Toshiba	2013
100	Laptop	Acer	2013
101	Laptop	Acer	2013
102	Printer	Canon	2013
103	Printer	Canon	2013
104	Printer	Canon	2013
105	Printer	Canon	2013
106	Printer	Canon	2013
107	Printer	Canon	2013
108	Printer	Canon	2013
109	Meja Kerja		2013
110	Meja Kerja		2013
111	Meja Kerja		2013
112	Meja Kerja		2013
113	Meja Kerja		2013
114	Meja Kerja		2013
115	Meja Kerja		2013
116	Meja Kerja		2013
117	Meja Kerja		2013
118	Meja Kerja		2013
119	Meja Biro		2013
120	Meja Biro		2013
121	Kursi Direktur	Uchiwa	2013
122	Kursi Tamu		2013
123	Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat)	Toyota Inova	2014
124	Pengadaan Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Honda	2014
125	Pengadaan Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Honda	2014
126	Pengadaan Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Honda	2014
127	Pengadaan mesin ketik	Olympus	2014
128	Pengadaan Kursi Putar		2014
129	Pengadaan Kursi Putar		2014
130	Pengadaan Kursi Putar		2014
131	Pengadaan Kursi Putar		2014
132	Pengadaan Kursi Putar		2014
133	Pengadaan Meja 1/2 Biro		2014
134	Pengadaan Meja 1/2 Biro		2014
135	Pengadaan Meja 1/2 Biro		2014
136	Pengadaan Meja 1/2 Biro		2014
137	Pengadaan Meja 1/2 Biro		2014
138	Pengadaan Pintu		2014
139	Pengadaan Pintu		2014
140	Pengadaan Pintu		2014
141	Pengadaan Pintu		2014

142	Pengadaan Pintu		2014
143	Pengadaan Televisi	Sharp	2014
144	Pengadaan Kamera Digital	Cannon	2014
145	Pengadaan Gorden		2014
146	Pengadaan Faximile	Panasonic	2014
147	Pengadaan Taplak Meja		2014
148	Pengadaan Komputer/ PC		2014
149	Pengadaan Laptop	Accer	2014
150	Pengadaan Laptop	Acer	2014
151	Pengadaan Printer	Cannon	2014
152	Pengadaan Printer	Cannon	2014
153	Pengadaan Printer	Cannon	2014
154	Pengadaan Printer	Canon	2014
155	Komputer PC	Lenovo	2015
156	Komputer PC	Lenovo	2015
157	Lap Top	Acer	2015
158	Lap Top	Acer	2015
159	Lap Top Simda	Acer	2015
160	Printer	Hawlet Packet	2015
161	Printer	Canon	2015
162	Printer	Canon	2015
163	Printer	Canon	2015
164	Printer	Canon	2015
165	Pengadaan Gorden		2015
166	Pengadaan Speaker		2015
167	Pengadaan Kips Angin	Panasonic	2015
168	Pengadaan Sarana Informasi Harga (Televisi)	Panasonic	2015
169	Pengadaan Pintu		2015
170	Pengadaan Dispenser		2015
171	Pengadaan Lemari Arsip 2 Pintu		2015
172	Pengadaan Lemari Arsip 2 Pintu		2015
173	Pengadaan Meja 1/2 Biro		2015
174	Pengadaan Meja 1/2 Biro		2015
175	Pengadaan Meja 1/2 Biro		2015
176	Pengadaan Meja 1/2 Biro		2015
177	Pengadaan Meja 1/2 Biro		2015
178	Pengadaan Meja 1/2 Biro		2015
179	Pengadaan Meja 1/2 Biro		2015
180	Meja Kayu		2015
181	Meja Kayu		2015
182	Etalase Kaca		2015
183	Tralis Galeri Sungai Misang		2015
184	Gedung Kantor		1983
185	Rumah Dinas dan Kantin		1998

186	Pagar	1999
187	Tempat Parkir	2000
188	Musholla	2000
189	Bangunan Gedung KOPERINDAG	2007
190	Pintu	2007
191	Pembelian Gedung	2008
192	Konstruksi Bangunan	2008
193	Pemasangan Con Blok Areal Parkir	2011
194	Rumah Mesin Genset	2011
195	Pembangunan MCK	2012
196	Pembangunan Los Pasar	2012
197	Bangunan Kantor Pengelola Pasar	2014
198	Bangunan Kantor Pengelola Pasar	2014
199	Pembangunan Pagar Kantor	2014
200	Pembangunan Galeri Industri Kerajinan	2014
201	Bangunan MCK Pasar	2014
202	Bangunan MCK Pasar	2014
203	Bangunan Area Parkir Pasar	2014
204	Bangunan Area Parkir Pasar	2014
205	Bangunan Area Parkir Pasar	2014
206	Bangunan Los Pasar	2014
207	Bangunan Los Pasar	2014
208	Bangunan Los Pasar	2014
209	Banguna Drainase Pasar	2014
210	Bangunan Drainase Pasar	2014
211	Bangunan Tempat Sampah Pasar	2014
212	Bangunan Tempat Sampah Pasar	2014
213	Bangunan Tempat Sampah Pasar	2014
214	Pasar Tradisional Desa Tanjung Benuang	2015
215	Pasar Tradisional Desa Pinang Merah	2015
216	Pasar Tradisional Desa Rawa Jaya	2015
217	Instalasi Listrik	2009
218	Komputer PC	2016
219	Laptop	2016
220	Printer	2016

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

2.3.1 Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi

Analisis kinerja pelayanan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran umum terkait kinerja

pelayanan Dinas KUKMPP sekaligus untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan. Guna mendapatkan gambaran yang cukup, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi OPD pada periode Renstra sebelumnya, yakni 2009-2013.

Secara umum capaian indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas KUKMPP tahun 2009-2013 sudah cukup baik, seluruh target indikator kinerja berhasil dicapai pada angka diatas 90%. Kecuali untuk indikator jumlah BPR/LKM aktif yang capaiannya masih 60%. Secara lebih jelas, target dan capaian realisasi indikator kinerja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
Dinas KUKMPP Kab. Merangin Tahun 2009-2013

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Realisasi
1	Jumlah sentra IKM	26 sentra	26 sentra	100%
2	Usaha Mikro dan Kecil	11.000 unit	10.834 unit	98,49%
3	BPR/LKM Aktif	5 unit	3 unit	60%
4	Persentase koperasi aktif	60%	56,88%	94,80%
5	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,50%	10,39%	98,95%
6	Pertumbuhan industri	3,14%	3,50%	96,62%
7	Cakupan bina kelompok pengrajin	33%	30,77%	96,16%
8	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	7,50%	7,41%	98,80%

2.3.2 Kinerja Pengelolaan Anggaran

Untuk mendapatkan gambaran terkait kinerja pengelolaan anggaran dilakukan perbandingan antara pagu anggaran belanja langsung dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2009-2013 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.2
Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Dinas KUKMPP Kab. Merangin Tahun 2009-2013

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1	2009	2.852.000.000	2.772.714.400	97,22%
2	2010	3.950.272.000	3.813.592.589	96,54%
3	2011	3.022.481.000	2.973.516.808	98,38%
4	2012	3.005.772.000	2.950.165.218	98,15%
5	2013	2.978.912.000	2.909.503.350	97,67%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kementerian Koperasi dan UKM RI, Renstra Kementerian Perdagangan RI, Rentsra Kementerian Perindustrian RI, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, maka dapat diidentifikasi beberapa tantangan sekaligus peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin, maka dapat ditinjau dari beberapa aspek urusan pemerintah sebagai berikut :

2.4.1 Koperasi dan UMKM

a. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

1. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM, ini sekaligus menjadi peluang untuk meningkatkan peran Dinas

KUKMPP Kabupaten Merangin untuk melakukan pembinaan terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM.

2. Masih rendahnya produktivitas dan nilai tambah serta daya saing KUMKM, hal ini menjadi pekerjaan rumah Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin untuk melakukan serangkaian pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas produk serta pangsa pasar bagi UMKM.
3. Masih minimnya akses pembiayaan koperasi dan UMKM, padahal sangat banyak lembaga baik bank maupun non yang menyediakan kredit permodalan. Pada titik ini peran fasilitasi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin menjadi amat penting untuk meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM dalam hal permodalan.
4. Masih belum tersedianya produk unggulan daerah yang dapat diandalkan guna meningkatkan daya saing daerah ditingkat provinsi, regional dan nasional.

b. Hambatan pengembangan pelayanan

1. Masih adanya stigma negatif dikalangan sebagian masyarakat bahwa keikutsertaan koperasi dan UMKM tidak begitu menguntungkan secara ekonomi.
2. Ketidakmampuan sebagian masyarakat pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit permodalan dari lembaga perbankan atau non bank.
3. Masih minimnya penggunaan teknologi oleh pelaku UMKM dalam pengembangan dan peningkatan produktifitas dan daya saing usaha.

2.4.2 Perindustrian

a. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

1. Kontribusi sektor industri, terutama IKM terhadap PDRB masih rendah, sedangkan pertumbuhan unit usaha iKM terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.
 2. Produk IKM yang ada sudah cukup banyak, namun belum mampu meningkatkan daya saing IKM secara khusus dan daya saing daerah secara umum.
 3. Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM belum dibarengi dengan peningkatan serapan tenaga kerja yang signifikan.
- b. Hambatan pengembangan pelayanan
1. Mayoritas pelaku IKM hanya menjadikan usaha IKM sebagai usaha sampingan dan tidak dijalankan secara maksimal.
 2. Masih minimnya sumber daya manusia pelaku IKM dalam menciptakan inovasi dan kualitas produk.
 3. Masih minimnya ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi pengembangan produk IKM.

2.4.3 Perdagangan

- a. Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan
1. Potensi perdagangan cukup baik, namun sektor perdagangan masih belum mampu berkontribusi secara lebih maksimal terhadap PDRB Kabupaten Merangin.
 2. Subsektor perlindungan konsumen belum bisa bekerja maksimal, dikarenakan belum ada kewenangan untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang terhadap alat UTTP, padahal Kabupaten Merangin sudah memiliki gedung metrologi legal berikut petugas bersertifikasi beserta peralatannya yang berimplikasi pada belum maksimalnya pendapatan asli daerah dari sektor jasa pelayanan tera/tera ulang alat UTTP.

3. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan menyediakan pendanaan yang cukup memadai untuk pembangunan sarana distribusi barang/pasar.

b. Hambatan Pengembangan Pelayanan

1. Minimnya alokasi anggaran mengakibatkan belum terpenuhinya persyaratan minimal peralatan untuk mendapatkan kewenangan melakukan tera/tera ulang.
2. Lokasi pembangunan pasar yang tepat dan bisa mendukung kelancaran distribusi barang relatif sulit disediakan
3. Masih sulitnya melepaskan petani dari pengaruh tengkulak yang mengakibatkan pasar lelang milik pemerintah daerah belum bisa dioperasikan.
4. Regulasi yang ada tidak memungkinkan Dinas KUKMPP melakukan pengawasan yang maksimal terhadap peredaran dan distribusi barang-barang bersubsidi.

Kedepan, untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu dilakukan pengkajian dan analisa yang komprehensif, agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dapat berjalan dengan baik. Faktor lingkungan internal dan eksternal tentu saja menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin yang dilakukan melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

a. Kekuatan (Strengths)

1. Potensi pemanfaatan teknologi tepat guna bagi KUKM.
2. Potensi Koperasi dan KUKM dari segi kuantitatif.
3. Pemberdayaan KUKM yang sangat strategis.
4. Kemandirian dalam usaha terdapat dinamika perkembangan pasar.

5. Regulasi penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
 6. Peraturan perlindungan konsumen keberadaan pasar tradisional yang tersebar diseluruh Kecamatan.
- b. Kelemahan (Weaknesses)
1. Kurangnya kemampuan pemanfaatan teknologi tepat guna oleh KUKM.
 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Koperasi.
 3. Keterbatasan modal, peluang pasar, dan sumberdaya manusia.
 4. Kualitas produk belum mempunyai daya saing yang memadai.
 5. Terbatasnya informasi teknologi oleh pelaku UKM.
 6. Belum adanya kekuatan hukum dalam melakukan intervensi terhadap gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok dipasaran.
- c. Peluang (Opportunities)
1. Terbukanya akses jaringan informasi untuk promosi KUKM.
 2. Berkembangnya sentra-sentra industri kreatif sebagai daya tarik tertentu.
 3. Tersedianya sumber permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
 4. Meningkatnya arus investasi ke Kabupaten Merangin.
 5. Adanya kebijakan pemerintah daerah tentang ekonomi kerakyatan.
 6. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembentukan UPTD Metrologi di Kabupaten.
- d. Ancaman (Threats)
1. Keterbatasan infrastruktur industri kreatif.
 2. SDM Koperasi KUKM yang belum memadai.
 3. Akses mendapatkan modal dari lembaga keuangan masih sulit karena persyaratan tertentu.

4. Meningkatnya produk yang masuk ke Kabupaten Merangin dengan kualitas yang lebih baik.
5. Adanya perdagangan bebas dan toko-toko modern.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin yang membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM serta

perdagangan dan perindustrian, sehingga tuntutan pengembangan dan peningkatan ekonomi kerakyatan lebih tepat sasaran.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin beberapa permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan sebagian masyarakat pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit permodalan dari lembaga bank atau non bank
2. Masih minimnya sumber daya manusia pelaku IKM dalam menciptakan inovasi dan meningkatkan kualitas produk
3. Masih sulitnya melepaskan petani dari pengaruh tengkulak yang mengakibatkan pasar lelang milik pemerintah daerah belum bisa dioperasikan
4. Regulasi yang ada tidak memungkinkan Dinas KUKMPP melakukan pengawasan yang lebih maksimal terhadap peredaran dan distribusi barang-barang bersubsidi
5. Belum optimalnya alokasi anggaran bagi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin, meski menangi tiga urusan, yakni Koperasi dan UKM, Perdagangan serta Perindustrian.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Daerah Kabupaten Merangin adalah “ **BERBENAH** menuju **MERANGIN EMAS**”.

BANGUN EKONOMI RAKYAT: Mengartikan bahwa hal yang utama dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi secara efisien dan efektif.

BERSIH: Mengartikan bahwa suatu kondisi dimana aparatur pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel

AMANAH: Mengartikan bahwa aparatur negara menjalankann tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin.

Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi dengan mengedepankan transparansi, efisiensi, efektif dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan dasar.
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan UMKM.
5. Meningkatkan prestasi generasi muda dan kesetaraan gender.
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan hutan, sumber daya alam (SDA) dan mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan Visi dan Misi tersebut diatas maka Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin berada pada Visi keempat yaitu **“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UMKM”** dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pembangunan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Pembangunan bidang Koperasi UMKM, perindustrian dan perdagangan merupakan suatu hal yang amat penting guna meningkatkan daya saing suatu daerah. Terlebih koperasi dan UMKM, sektor ini merupakan salah satu pilar penting yang menjadi penunjang perekonomian daerah Kabupaten Merangin. Terbukti, sektor riil yang didominasi oleh koperasi UMKM, mampu bertahan dalam segala kondisi perekonomian.

Pada konteks Kabupaten Merangin, meski merupakan salah satu pilar ekonomi, namun keberadaan koperasi dan UMKM masih belum mampu

berperan banyak dalam mendongkrak perekonomian daerah. Setidaknya dibuktikan dengan kontribusi sektor industri dan perdagangan yang didominasi UMKM terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Merangin masih dibawah 20%. Secara umum terdapat beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin sebagai berikut :

1. Masih banyak mind site yang salah dari masyarakat, dengan memandang keikutsertaan koperasi dan UMKM sebagai usaha dan kegiatan yang tidak menjanjikan hasil secara ekonomi.
2. Masih minimnya peran serta pemerintah dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan daya saing UMKM
3. Sulitnya akses permodalan serta ketidakmampuan masyarakat pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan permodalan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi

Perubahan Renstra Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin merupakan bentuk pengembangan dari visi misi yang ditetapkan sebelumnya. Berkaitan dengan Renstra Kementerian/lembaga maupun Renstra provinsi dapat tergambar sebagaimana table 3.3.1 di bawah ini :

Tabel 3.3
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin Berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten /Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Penanganan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional	Keterbatasan jangkauan pelayanan, fasilitas dan pembinaan KUMKM	Keterbatasan anggaran	Adanya komitmen pengembangan KUMKM

2	Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM		Belum diketahuinya data seluruh potensi KUMKM	Adanya kesesuaian program dengan kementerian/lembaga
3	Daya saing produk koperasi dan UMKM		Kurangnya sinergitas antar SKPD dan dengan stakeholder lain	
4	Peningkatan pemasaran produk koperasi dan UMKM			
5	Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi koperasi dan UMKM			
6	Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada koperasi dan UMKM			
7	Pengembangan wirausaha koperasi dan UMKM baru			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisiensi dan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RT, RW dan KHLS sebagaimana tabel 3.4.1 dibawah ini :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin Berdasarkan Telaahan RT/RW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Koperindag	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya tata ruang yang aman, produktif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional	Lokasi usaha pelaku UMKM yang tidak sesuai dengan RT, RW/ketentuan lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dana UMKM untuk mengalihkan lokasi usaha/ memproses izin lokasi usaha 2. Mentalitas pelaku usaha yang cenderung mencari lokasi strategis namun melanggar ketentuan RT, RW/K3 3. Sinergitas antar pelaku usaha yang relatif rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program relokasi 2. Adanya program sertifikasi/ legalisasi tempat usaha 3. Adanya program kementerian/ lembaga

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pembangunan di bidang Koperasi/UMKM Perindustrian dan Perdagangan antara lain :

1. Masih rendahnya akses pelaku UMKM terhadap sumber pembiayaan dan permodalan akibat ketidakmampuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan lembaga bank atau non bank.
2. Keterbatasan fasilitas dan pembinaan terhadap UMKM
3. Lokasi usaha yang belum memenuhi ketentuan penggunaan ruang

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kebijakan yang digariskan dan dijalankan oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin adalah sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

4.1 Visi dan Misi OPD

4.1.1 Visi

Visi merupakan penjelasan tentang arah atau suatu kondisi dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi atau situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Adapun Visi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin adalah : **“Terwujudnya Pembangunan Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”**

4.1.2 Misi

Untuk mendukung Visi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang dicapai, maka Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin mengemban Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap Koperasi dan UMKM
2. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Untuk Lebih jelasnya Visi dan Misi SKPD Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel 4.1.1 dibawah ini :

Tabel 4.1.1

Ringkasan visi dan misi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Visi
1	2	3	4
Terwujudnya Pembangunan Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Pembangunan dan pengembangan : a. Koperasi dan UMKM b. Perdagangan c. Perindustrian	1. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap Koperasi dan UMKM 2. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka lima tahun. Tujuan yang ditetapkan tersebut telah mengacu pada visi dan misi organisasi, yaitu :

- a. Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan
- b. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketenagakerjaan dan kinerja BUMD

4.2.2 Sasaran Strategis

Sasaran yang telah ditetapkan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin adalah :

- a. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
- b. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan SKPD sebagaimana table 4.2.2.1 dibawah ini :

Tabel 4.2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Sasaran Sebagai Faktor				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	Peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi	Usaha Mikro dan Kecil	315 Unit	265 Unit	85 Unit	30 Unit	73 Unit
			Jumlah BPR/LKM aktif	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	0
			Persentase koperasi aktif	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1%

2	Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketenagakerjaan dan kinerja BUMD	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,89%	12,41%	12,93%	12,97%	13%
			Pertumbuhan industri	1,35%	1,45%	1,55%	0,15%	0,15%
			Cakupan bina kelompok pengrajin	12%	12%	12%	7%	7%
			Jumlah sentra IKM	0	0	1 Sentra	0	1 Sentra
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	7,50%	7,59%	7,66%	7,76%	7,85%

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong tumbuhnya wirausaha muda baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM
- c. Meningkatkan sistem pengamanan tata niaga dan perlindungan konsumen

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Koperasi dan UKM
 1. Meningkatkan keikutsertaan dan melibatkan dinas/instansi terkait, masyarakat profesional, asosiasi dunia usaha dalam pembangunan koperasi dan UMKM
 2. Mendorong kemitraan koperasi dan UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar.
 3. Meningkatkan SDM pelaku Koperasi dan UMKM

- b. Bidang Perindustrian
 1. Meningkatkan keikutsertaan dan melibatkan dinas/instansi terkait, masyarakat profesional, asosiasi dunia usaha dalam pembangunan IKM
 2. Mendorong kemitraan IKM dengan perusahaan-perusahaan besar.
 3. Meningkatkan SDM pelaku IKM
 4. Meningkatkan volume bantuan peralatan bagi IKM

- c. Bidang Perdagangan
 1. Meningkatkan peran serta masyarakat pengusaha pedagang kecil dan menengah serta Koperasi, terutama dalam mendukung terbentuknya sistem distribusi barang kebutuhan pokok, dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau
 2. Meningkatkan jangkauan distribusi barang melalui pembangunan pasar rakyat yang lebih representatif
 3. Meningkatkan perlindungan konsumen melalui penumbuhan kesadaran tertib ukur bagi pengguna alat UTPP

Secara lebih jelas, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas KUKMPPKabupaten Merangin dapat dilihat pada table 4.3.1 dibawah ini:

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas KUKMPPKabupaten Merangin

<i>Visi : Terwujudnya pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan</i>			
<i>Misi I : Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap Koperasi dan UMKM</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi	Mendorong tumbuhnya wirausaha muda baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keikutsertaan dan melibatkan dinas/instansi terkait, masyarakat profesional, asosiasi dunia usaha dalam pembangunan koperasi dan UMKM 2. Mendorong kemitraan koperasi dan UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar. 3. Meningkatkan SDM pelaku Koperasi dan UMKM
<i>Misi II : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keikutsertaan dan melibatkan dinas/instansi terkait, masyarakat profesional, asosiasi dunia usaha dalam

<p>daya saing investasi, ketenagakerjaan dan kinerja BUMD</p>	<p>fiskal daerah</p>		<p>pembangunan IKM</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong kemitraan IKM dengan perusahaan-perusahaan besar. 3. Meningkatkan SDM pelaku IKM 4. Meningkatkan volume bantuan peralatan bagi IKM
		<p>Meningkatkan sistem pengamanan tata niaga dan perlindungan konsumen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta masyarakat pengusaha pedagang kecil dan menengah serta Koperasi, terutama dalam mendukung terbentuknya sistem distribusi barang kebutuhan pokok, dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau 2. Meningkatkan jangkauan distribusi barang melalui pembangunan pasar rakyat yang lebih representatif 3. Meningkatkan perlindungan konsumen melalui penumbuhan kesadaran tertib ukur bagi pengguna alat UTP

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KUKMPP KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2014 - 2018

Dari strategi dan kebijakan yang diambil, maka Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 13. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
 14. Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah

- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pembangunan Gedung Kantor
 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 3. Pengadaan peralatan gedung kantor
 4. Pengadaan peralatan dapur
 5. Pengadaan Meubeleur

6. Pengadaan Komputer
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
9. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus-Khusus Hari Tertentu

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Laporan Tahunan

VI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

1. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
4. Penyusunan IKU dan PK Perangkat Daerah
5. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

VII. Program Penyelenggaraan Aparatur

1. Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit

VIII. Program Visualisasi Hasil Pembangunan

1. Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan

- IX. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - 1. Monitoring dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan
 - 2. Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga
 - 3. Monitoring dan Pengawasan Barang Berbahaya
 - 4. Monitoring dan pengawasan barang bersubsidi

- X. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - 1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
 - 2. Fasilitasi dan pembinaan komoditi Lelang Agro
 - 3. Penyelenggaraan Pasar Rakyat Kabupaten Merangin
 - 4. Promosi dan Ekspo Potensi Kabupaten Merangin
 - 5. Pengembangan pasar lelang daerah

- XI. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - 1. Pembinaan, penertiban dan pengawasan pasar

- XII. Program Pengembangan UPT Kemetrolgian
 - 1. Tera Ulang alat UTTP
 - 2. Pengadaan peralatan dan sarana metrologi legal
 - 3. Sosialisasi Perda Retribusi Tera/Tera Ulang Alat UTTP
 - 4. Verifikasi standar kerja alat tera alat UTTP
 - 5. Monitoring dan pengawasan alat UTTP
 - 6. Penyuluhan perlindungan konsumen dan pos ukur ulang non BDKT

- XIII. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan
 - 1. Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar Tradisional
 - 2. Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal

- XIV. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - 1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

2. Pelatihan manajemen KSP/USP Koperasi

XV. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
2. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Data Base KSP/USP Koperasi dan UMKM
4. Bantuan peralatan bagi UMKM

XVI. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
2. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
3. Pembinaan Usaha Koperasi
4. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Penguatan lembaga Dekopinda Merangin

XVII. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

1. Bantuan Peralatan Industri

XVIII. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1. Temu Usaha Industri
2. Penyediaan sarana promosi industri kecil dan menengah
3. Koordinasi teknis dewan kerajinan nasional

XIX. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1. Pelatihan Teknis Produksi

XX. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

1. Gelar Produk Industri dan Kerajinan Kabupaten Merangin
2. Monitoring Usaha Industri

3. Souvenir Produk Kerajinan
4. Penyusunan database IKM

XXI. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perindustrian

1. Revitalisasi Sentra IKM

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin 2014 – 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			
								Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target		Rp	
						Target		Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target			Rp
						Volume	Satuan	Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat / Bintek	XX.XX.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat / Bintek	20	%	Rp.23.100.000,00	25	%	Rp.58.700.000,00	28	%	Rp.64.000.000,00	31	%	Rp.10.000.000,00	36	%	Rp.39.200.000,00	40	%	Rp.45.000.000,00	40	%	Rp.216.900.000,00
			XX.XX.04.03	1302 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Teknis Fungsional	5	Orang	Rp.23.100,000.00	10	Orang	Rp.58.700,000.00	6	Orang	Rp.64.000,000.00	2	Orang	Rp.10.000,000.00	4	Orang	Rp.39.200,000.00	5	Orang	Rp.45.000,000.00	27	Orang	Rp.216.900.000,00

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Rata-rata Perseentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	XX.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75	%	Rp.13.400.000,00	80	%	Rp.68.487.000,00	82	%	Rp.14.465.000,00	83	%	Rp.16.165.000,00	84	%	Rp.21.381.000,00	85	%	Rp.39.700.000,00	85	%	Rp.1.601.996.000,00
			XX.XX.02.01	1273 Pembangunan gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	0	Unit	Rp.0.00	1	Unit	Rp.19.445.000,00	0	Unit	Rp.0.00	1	Unit	Rp.20.250.00.00	0	Unit	Rp.0.00	1	Unit	Rp.20.000.000,00	1	Unit	Rp.414.705.000,00
			XX.XX.02.05	1277 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	0	Unit	Rp.0.00	4	Unit	Rp.32.963.000,00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	2	Unit	Rp.36.000,00.00	0	Unit	Rp.0.00	6	Unit	Rp.365.633.000,00
			XX.XX.02.08	1280 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	5	Unit	Rp.15.000,00.00	5	Unit	Rp.21.900,00.00	4	Unit	Rp.12.050,00.00	5	Unit	Rp.35.400,00.00	0	Unit	Rp.0.00	10	Unit	Rp.25.000,00.00	24	Unit	Rp.94.350.000,00

			XX.XX .02.09	1281 Pengada an Peralatan Dapur	Jumlah peralatan dapur yang disediaka n	0	unit	Rp.0.0 0	0	unit	Rp.0.0 0	0	unit	Rp.0.0 0	0	unit	Rp.0.0 0	10	unit	Rp.25, 000,0 00.00	15	unit	Rp.25,00 0,000.00			
			XX.XX .02.11	1283 Pengada an mebeleur	Jumlah Meubeler yang diadakan	5	Unit	Rp.18, 500,0 00.00	5	Unit	Rp.19, 350,0 00.00	4	Unit	Rp.13, 200,0 00.00	0	Unit	Rp.0.0 0	26	Unit	Rp.30, 650,0 00.00	15	Unit	Rp.20, 500,0 00.00	50	Unit	Rp.83,70 0,000.00
			XX.XX .02.12	1284 Pengada an komputer	Jumlah perangka t komputer yang disediaka n	3	Unit	Rp.25, 000,0 00.00	5	Unit	Rp.28, 400,0 00.00	6	Unit	Rp.48, 400,0 00.00	6	Unit	Rp.37, 850,0 00.00	5	Unit	Rp.49, 850,0 00.00	3	Unit	Rp.31, 500,0 00.00	24	Unit	Rp.196,0 00,000.0 0
			XX.XX .02.15	1287 Pemeliha raan rutin/berk ala kendaraa n dinas/op erasional	Jumlah Kendara an Dinas/ Operasio nal yang dipelihar a	24	Unit	Rp.43, 000,0 00.00	24	Unit	Rp.67, 350,0 00.00	28	Unit	Rp.45, 500,0 00.00	28	Unit	Rp.59, 950,0 00.00	28	Unit	Rp.54, 450,0 00.00	30	Unit	Rp.60, 000,0 00.00	30	Unit	Rp.287,2 50,000.0 0
			XX.XX .02.19	1291 Pemeliha raan rutin/berk ala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihar a	10	unit	Rp.12, 500,0 00.00	10	unit	Rp.15, 700,0 00.00	10	unit	Rp.10, 200,0 00.00	13	unit	Rp.8.2 00,00 0.00	12	unit	Rp.6,3 00,00 0.00	15	unit	Rp.10, 000,0 00.00	50	unit	Rp.50,40 0,000.00
			XX.XX .02.23	1378 Pemeliha raan rutin/berk ala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihar a	1	Unit	Rp.20, 000,0 00.00	1	Unit	Rp.8,0 90,00 0.00	1	Unit	Rp.15, 300,0 00.00	0	Unit	Rp.0.0 0	1	Unit	Rp.36, 568,0 00.00	1	Unit	Rp.25, 000,0 00.00	1	Unit	Rp.84,95 8,000.00

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	XX.XX.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	75	%	Rp.30.000,00	80	%	Rp.28.125,00	82	%	Rp.31.650,00	83	%	Rp.34.245,00	84	%	Rp.69.200,00	85	%	Rp.69.350,00	85	%	Rp.232.570.000,00
			XX.XX.05.01	1304 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	77	Stel	Rp.30.000,00	0	Stel	Rp.0,00	77	Stel	Rp.31.650,00	78	Stel	Rp.34.245,00	90	Stel	Rp.41.350,00	90	Stel	Rp.41.350,00	335	Stel	Rp.148,595.000,00
			XX.XX.05.02	1305 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus yang disediakan	0	Stel	Rp.0,00	77	Stel	Rp.28.125,00	0	Stel	Rp.0,00	0	Stel	Rp.0,00	90	Stel	Rp.27.850,00	90	Stel	Rp.28.000,00	257	Stel	Rp.83,975.000,00
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Rata-rata Prestasi Kinerja tenaga fungsional	04.03.01	Program Penyelenggaraan Aparatur	Rata-rata Prestasi Kinerja tenaga fungsional	94	%	Rp.0,00	94	%	Rp.0,00	94	%	Rp.8.250,00	96	%	Rp.11.100,00	98	%	Rp.7.969,00	100	%	Rp.8.000,00	100	%	Rp.35.319.000,00

	untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan																									
			04.03.01.01	634 Penyusunan dan penetapan angka kredit	Tersusunnya angka kredit pegawai fungsional	0	Orang	Rp.0.00	0	Orang	Rp.0.00	11	Orang	Rp.8,250.00	11	Orang	Rp.11,100.00	11	Orang	Rp.7,969.00	11	Orang	Rp.8,000.00	11	Orang	Rp.35,319,000.00
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	XX.XX.07	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	1	Kali	Rp.33.250.00	1	Kali	Rp.34.337.00	1	Kali	Rp.49.480.00	1	Kali	Rp.45.000.00	1	Kali	Rp.35.000.00	1	Kali	Rp.40.000.00	5	Kali	Rp.203.817,000.00
			XX.XX.07.01	1313 Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan	Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan	1	Kali	Rp.33.250.00	1	Kali	Rp.34.337.00	1	Kali	Rp.49.480.00	1	Kali	Rp.45.000.00	1	Kali	Rp.35.000.00	1	Kali	Rp.40.000.00	5	Kali	Rp.203.817,000.00
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP	XX.XX.03	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	C		Rp.27.450.00	C		Rp.27.500.00	C		Rp.33.295.00	C		Rp.31.885.00	C		Rp.39.940.00	B		Rp.40.870.00	B		Rp.173.490,000.00

			XX.XX .03.01	1293 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	0	Dok um en	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	70	Doku men	Rp.7,5 75,00 0.00	70	Doku men	Rp.9,2 60,00 0.00	70	Doku men	Rp.9,1 80,00 0.00	70	Doku men	Rp.9,1 80,00 0.00	280	Doku men	Rp.35,19 5,000.00
			XX.XX .03.02	1294 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	0	Dok um en	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	10	Doku men	Rp.6,7 00,00 0.00	10	Doku men	Rp.8,9 50,00 0.00	10	Doku men	Rp.10, 830,0 00.00	10	Doku men	Rp.10, 830,0 00.00	40	Doku men	Rp.37,31 0,000.00
			XX.XX .03.04	1296 Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang disusun	10	Dok um en	Rp.7,3 00,00 0.00	10	Doku men	Rp.7,3 50,00 0.00	10	Doku men	Rp.6,5 60,00 0.00	10	Doku men	Rp.5,8 25,00 0.00	10	Doku men	Rp.10, 860,0 00.00	10	Doku men	Rp.10, 860,0 00.00	50	Doku men	Rp.41,45 5,000.00
			XX.XX .03.05	1298 Penyusunan pelaporan keuangan semester semester an	Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	20	Dok um en	Rp.20, 150,0 00.00	20	Doku men	Rp.20, 150,0 00.00	10	Doku men	Rp.12, 460,0 00.00	10	Doku men	Rp.7,8 50,00 0.00	10	Doku men	Rp.9,0 70,00 0.00	10	Doku men	Rp.10, 000,0 00.00	60	Doku men	Rp.59,53 0,000.00
Menin gkatny a Tata Kelola Pemer intah n yang baik	Peningk atan kualitas dokumen perencana an pembang unan daerah	Perse ntase tingkat kesela rasan RKPD terhad ap RPJMD	XX.XX .06	Program peningk atan Pengemb angan Sistem Perencana an	Persenta se tingkat keselaras an RKPD terhadap RPJMD	60	%	Rp.18, 700.0 00,00	65	%	Rp.18, 700.0 00,00	70	%	Rp.27, 205.0 00,00	75	%	Rp.23, 800.0 00,00	80	%	Rp.47, 525.0 00,00	95	%	Rp.85, 025.0 00,00	95	%	Rp.202.2 55,000.0 0

			XX.XX .06.01	1306 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Tersedia nya dokumen rencana kerja SKPD selama 5 tahun	0	Dok um en	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	10	Doku men	Rp.15, 000,0 00.00	10	Doku men	Rp.15,00 0,000.00
			XX.XX .06.02	1307 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	0	Dok um en	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	10	Doku men	Rp.2,9 75,00 0.00	10	Doku men	Rp.6,5 30,00 0.00	10	Doku men	Rp.19, 215,0 00.00	10	Doku men	Rp.19, 215,0 00.00	40	Doku men	Rp.47,93 5,000.00
			XX.XX .06.03	1308 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	80	Dok um en	Rp.18, 700,0 00.00	80	Doku men	Rp.18, 700,0 00.00	80	Doku men	Rp.24, 230,0 00.00	90	Doku men	Rp.17, 270,0 00.00	90	Doku men	Rp.28, 310,0 00.00	90	Doku men	Rp.28, 310,0 00.00	430	Doku men	Rp.116,8 20,000.0 0
			XX.XX .06.05	1310 Penyusunan IKU dan PK Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKU dan PK yang disusun	0	Dok um en	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	10	Doku men	Rp.10, 000,0 00.00	10	Doku men	Rp.10,00 0,000.00
			XX.XX .06.07	1312 Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Terlaksana nya Evaluasi Rencana Kerja SKPD	0	Dok um en	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	0	Doku men	Rp.0.0 0	20	Doku men	Rp.12, 500,0 00.00	20	Doku men	Rp.12,50 0,000.00
Menin gkatnya Tata Kelola Pemer intahan yang baik	Penataan administr asi dan tata kelola Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan oleh	Perse ntase penye diaan pelaya nan admini strasi perka ntoran oleh	XX.XX .01	Program Pelayanan Administ rasi Perkantoran	Persenta se penyedia an pelayana n administ rasi perkantoran	90	%	Rp.70 9.178. 000,0 0	91	%	Rp.71 7.260. 000,0 0	92	%	Rp.67 2.414. 000,0 0	93	%	Rp.87 8.678. 000,0 0	94	%	Rp.64 3.250. 000,0 0	95	%	Rp.74 8.150. 000,0 0	95	%	Rp.3.659 .752.000, 00

			XX.XX .01.09	761 Penyediaan alat tulis kantor	tersedian ya alat tulis kantor	12	bulan	Rp.41,700,000.00	12	bulan	Rp.42,755,000.00	12	bulan	Rp.46,241,000.00	12	bulan	Rp.46,800,000.00	12	bulan	Rp.43,400,000.00	12	bulan	Rp.45,000,000.00	12	bulan	Rp.224,196,000.00
			XX.XX .01.10	762 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	penyediaan barang cetakan dan pengandaan	5	jenis	Rp.10,000,000.00	5	jenis	Rp.9,825,000.00	5	jenis	Rp.11,400,000.00	5	jenis	Rp.15,560,000.00	5	jenis	Rp.19,600,000.00	5	jenis	Rp.19,600,000.00	5	jenis	Rp.75,985,000.00
			XX.XX .01.11	763 Penyediaan komponen instalasi listrik/pengerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik yang diadakan	5	jenis	Rp.2,500,000.00	5	jenis	Rp.2,130,000.00	5	jenis	Rp.3,150,000.00	5	jenis	Rp.3,150,000.00	5	jenis	Rp.9,200,000.00	5	jenis	Rp.10,000,000.00	5	jenis	Rp.27,630,000.00
			XX.XX .01.12	764 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	jumlah bahan bacaan peraturan perundangan yang diadakan	8	media massa	Rp.30,500,000.00	9	media massa	Rp.34,000,000.00	9	media massa	Rp.30,000,000.00	10	media massa	Rp.41,100,000.00	6	media massa	Rp.24,000,000.00	10	media massa	Rp.25,000,000.00	10	media massa	Rp.154,100,000.00
			XX.XX .01.13	765 Penyediaan makanan dan minuman	tersedian ya makanan dan minuman pegawai/pasien /tamu	12	bulan	Rp.25,000,000.00	12	bulan	Rp.21,300,000.00	12	bulan	Rp.26,000,000.00	12	bulan	Rp.26,100,000.00	12	bulan	Rp.26,000,000.00	12	bulan	Rp.26,000,000.00	12	bulan	Rp.125,400,000.00

			XX.XX .01.14	766 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	prekuens i rapat koordinasi dan konsultasi yang di laksanakan	80	kali	Rp.30 1,000, 000.0 0	85	kali	Rp.30 6,967, 000.0 0	55	kali	Rp.26 4,285, 000.0 0	95	kali	Rp.37 0,205, 000.0 0	35	kali	Rp.20 1,400, 000.0 0	50	kali	Rp.30 0,000, 000.0 0	50	kali	Rp.1,442 ,857,000. 00
			XX.XX .01.15	767 Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	prekuens i koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	40	kali	Rp.8,0 00,00 0.00	44	kali	Rp.8,8 05,00 0.00	48	kali	Rp.9,5 30,00 0.00	381	kali	Rp.76, 100,0 00.00	40	kali	Rp.8,8 00,00 0.00	50	kali	Rp.10, 000,0 00.00	50	kali	Rp.113,2 35,000.0 0
			XX.XX .01.32	1521 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Tersedianya jasa perbaikan Peralatan Kantor	0	Bulan	Rp.0.0 0	0	Bulan	Rp.0.0 0	12	Bulan	Rp.5,1 50,00 0.00	12	Bulan	Rp.5,1 50,00 0.00	12	Bulan	Rp.6,1 50,00 0.00	12	Bulan	Rp.6,1 50,00 0.00	12	Bulan	Rp.22,60 0,000.00
Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi	Jumlah usaha Mikro dan Kecil	02.12. 05	Program pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah usaha Mikro dan Kecil	10, 834	Unit	Rp.51. 900.0 00,00	315	Unit	Rp.51. 956.0 00,00	265	Unit	Rp.55. 600.0 00,00	85	Unit	Rp.10 6,125. 000,0 0	30	Unit	Rp.12. 715.0 00,00	73	Unit	Rp.10 2,400. 000,0 0	11,60 2	Unit	Rp.328.7 96,000.0 0

			02.12.05.01	481 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah yang dilatih	20	orang	Rp.51,900.00	20	orang	Rp.51,956.00	25	orang	Rp.55,600.00	20	orang	Rp.106,125,000.00	20	orang	Rp.12,715,000.00	20	orang	Rp.51,200,000.00	105	orang	Rp.277,596,000.00
			02.12.05.02	484 Pelatihan Manajemen KSP/USP Koperasi	Jumlah yang dilatih	0	orang	Rp.0.00	0	orang	Rp.0.00	0	orang	Rp.0.00	0	orang	Rp.0.00	0	orang	Rp.0.00	20	orang	Rp.51,200,000.00	20	orang	Rp.51,200,000.00
Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi	Jumlah BPR/LKM aktif	02.12.02	Program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha mikro kecil menengah	Jumlah BPR/LKM aktif	3	Unit	Rp.131,914,000.00	1	Unit	Rp.134,839,000.00	0	Unit	Rp.46,458,000.00	1	Unit	Rp.12,325,000.00	1	Unit	Rp.138,740,000.00	0	Unit	Rp.310,500,000.00	6	Unit	Rp.642,862,000.00
			02.12.02.01	1133 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintahan untuk usaha kecil menengah dan koperasi	Jumlah koordinasi	3	Kali	Rp.35,600.00	3	Kali	Rp.38,525.00	2	Kali	Rp.16,000.00	3	Kali	Rp.6,775.00	4	Kali	Rp.50,090.00	4	Kali	Rp.51,000.00	4	Kali	Rp.162,390,000.00

			02.12.02.02	1134 Pemantauan Pengelolaan penggunaan dan pemerintah bagi usaha mikro Kecil Menengah kecil menengah	Pengembangan kredit permodalan	70	KSP/USP	Rp.39,135,000.00	70	KSP/USP	Rp.39,135,000.00	70	KSP/USP	Rp.14,256,000.00	70	KSP/USP	Rp.2,900,000.00	70	KSP/USP	Rp.5,900,000.00	70	KSP/USP	Rp.32,500,000.00	70	KSP/USP	Rp.94,691,000.00
			02.12.02.03	1135 Penyusunan Data Base KSP/USP koperasi dan UMKM	Tersedianya database UMKM	519	Koperasi/UMKM	Rp.57,179,000.00	579	Koperasi/UMKM	Rp.57,179,000.00	619	Koperasi/UMKM	Rp.16,202,000.00	634	Koperasi/UMKM	Rp.2,650,000.00	649	Koperasi/UMKM	Rp.4,650,000.00	677	Koperasi/UMKM	Rp.25,000,000.00	677	Koperasi/UMKM	Rp.105,681,000.00
			02.12.02.05	1137 Bantuan Peralatan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang dibantu	0	UMKM	Rp.0.00	0	UMKM	Rp.0.00	0	UMKM	Rp.0.00	20	UMKM	Rp.0.00	15	UMKM	Rp.78,100,000.00	20	UMKM	Rp.202,000,000.00	55	UMKM	Rp.280,100,000.00
Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi	Persepsi koperasi aktif	02.12.03	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	56.88	%	Rp.190,600,000.00	1.50	%	Rp.189,904,500.00	1.50	%	Rp.137,656,000.00	1.50	%	Rp.134,155,000.00	1.50	%	Rp.200,420,000.00	1.00	%	Rp.218,500,000.00	63.88	%	Rp.880,635,500.00

			02.12.03.01	445 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah sosialisasi	4 kali	Rp.59,200,00.00	4 kali	Rp.61,122,500.00	3 kali	Rp.47,983,000.00	3 kali	Rp.23,425,000.00	2 kali	Rp.18,270,000.00	2 kali	Rp.25,000,000.00	14 kali	Rp.175,800,500.00
			02.12.03.02	448 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi prestasi	Jumlah pembinaan dan pengawasan	1 kali	Rp.95,700,000.00	2 kali	Rp.124,674,000.00	2 kali	Rp.45,648,000.00	2 kali	Rp.10,725,000.00	1 kali	Rp.79,725,000.00	1 kali	Rp.80,000,000.00	8 kali	Rp.430,772,000.00
			02.12.03.03	451 Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah penilaian	0 kali	Rp.0.00	0 kali	Rp.0.00	1 kali	Rp.17,975,000.00	1 kali	Rp.4,755,000.00	1 kali	Rp.4,950,000.00	1 kali	Rp.20,000,000.00	4 kali	Rp.47,680,000.00
			02.12.03.09	474 Penguatan lembaga Dekopinda Merangin	Presentase penguatan dekopinda	60 %	Rp.0.00	0 %	Rp.0.00	0 %	Rp.0.00	0 %	Rp.0.00	3 %	Rp.83,975,000.00	2 %	Rp.75,000,000.00	65 %	Rp.158,975,000.00
			02.12.03.10	1879 Pembinaan Usaha Koperasi	Jumlah Pembinaan yang dilakukan	2 kali	Rp.35,700,000.00	4 kali	Rp.4,108,000.00	2 kali	Rp.26,050,000.00	2 kali	Rp.5,250,000.00	2 kali	Rp.13,500,000.00	2 kali	Rp.18,500,000.00	12 kali	Rp.67,408,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	03.04.03	Program perlindungan konsumen dan perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10.39 %	Rp.45,750,000.00	11.89 %	Rp.59,042,000.00	12.41 %	Rp.67,232,000.00	12.93 %	Rp.29,685,000.00	12.97 %	Rp.48,575,000.00	13 %	Rp.91,290,000.00	13 %	Rp.295,824,000.00

	peningkatan kemandirian fiskal daerah																									
			03.04.03.02	142 Monitoring dan pengawasan wajib daftar perusahaan	Frekuensi Pemantauan Wajib Daftar Perusahaan	2	Kali	Rp.15,000,000.00	3	Kali	Rp.19,121,000.00	3	Kali	Rp.17,740,000.00	2	Kali	Rp.3,525,000.00	1	Kali	Rp.4,725,000.00	2	Kali	Rp.15,000,000.00	11	Kali	Rp.60,111,000.00
			03.04.03.03	145 Monitoring dan pengawasan perkembangan harga barang	Frekuensi Pengawasan Harga Barang	1	Kali/Bulan	Rp.12,500,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.19,700,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.17,077,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.4,060,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.16,260,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.18,700,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.75,797,000.00
			03.04.03.05	150 Monitoring dan pengawasan barang berbahaya	Frekuensi Pengawasan Barang Berbahaya	1	Kali/tahun	Rp.18,250,000.00	2	Kali/tahun	Rp.20,221,000.00	4	Kali/tahun	Rp.32,415,000.00	3	Kali/tahun	Rp.22,100,000.00	2	Kali/tahun	Rp.27,590,000.00	2	Kali/tahun	Rp.27,590,000.00	2	Kali/tahun	Rp.129,916,000.00
			03.04.03.06	2153 Monitoring dan pengawasan barang bersubsidi	Frekuensi pengawasan barang bersubsidi	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	4	Kali	Rp.30,000,000.00	4	Kali	Rp.30,000,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	03.04.04	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10.39	%	Rp.138,150,000.00	11.89	%	Rp.219,232,000.00	12.41	%	Rp.170,702,000.00	12.93	%	Rp.108,765,000.00	12.97	%	Rp.152,435,000.00	13	%	Rp.5794,700,000.00	13	%	Rp.6,445,834,000.00

	peningkatan kemandirian fiskal daerah																							
			03.04.04.01	193 Fasilitasi dan pembinaan komoditi lelang agro	Jumlah fasilitasi lelang agro	2 kali	Rp.15,150,000.00	2 kali	Rp.16,462,000.00	2 kali	Rp.22,604,000.00	1 kali	Rp.4,300,000.00	2 kali	Rp.17,300,000.00	2 kali	Rp.22,500,000.00	9 kali	Rp.83,166,000.00					
			03.04.04.02	194 Penyelenggaraan pasar rakyat Kabupaten Merangin	Jumlah penyelenggaraan pasar rakyat	1 Kecamatan	Rp.10,000,000.00	10 Kecamatan	Rp.80,000,000.00	10 Kecamatan	Rp.75,238,000.00	10 Kecamatan	Rp.62,000,000.00	10 Kecamatan	Rp.64,350,000.00	10 Kecamatan	Rp.70,000,000.00	10 Kecamatan	Rp.351,588,000.00					
			03.04.04.03	198 Promosi dan ekspotensi Kabupaten Merangin	Jumlah promo	3 kali	Rp.113,000,000.00	3 kali	Rp.122,770,000.00	2 kali	Rp.72,860,000.00	2 kali	Rp.42,465,000.00	1 kali	Rp.41,550,000.00	2 kali	Rp.70,000,000.00	10 kali	Rp.349,645,000.00					
			03.04.04.04	200 Pengembangan pasar lelang daerah	Tertaksananya pasar lelang daerah	0 Unit	Rp.0.00	0 Unit	Rp.0.00	0 Unit	Rp.0.00	0 Unit	Rp.0.00	3 Unit	Rp.29,235,000.00	3 Unit	Rp.32,200,000.00	3 Unit	Rp.61,435,000.00					
			03.04.04.06	2246 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah Pasar yang dikembangkan	0 Unit	Rp.0.00	0 Unit	Rp.0.00	0 Unit	Rp.0.00	0 Unit	Rp.0.00	0 Unit	Rp.0.00	8 Unit	Rp.5,600,000.00	8 Unit	Rp.5,600,000.00					

Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	03.04.02	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10.39	%	Rp.0.00	11.89	%	Rp.0.00	12.41	%	Rp.0.00	12.93	%	Rp.0.00	12.97	%	Rp.165.150.000,00	13	%	Rp.180.000.000,00	13	%	Rp.345.150.000,00
			03.04.02.01	599 Pembinaan, Penertiban dan Pengawasan Pasar	Frekuensi pembinaan, penertiban dan pengawasan pasar	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	4	Kali	Rp.165.150.000,00	4	Kali	Rp.180.000.000,00	4	Kali	Rp.345.150.000,00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	03.04.05	Program Pengembangan UPT Kemetrol ogian	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10.39	%	Rp.38.350.00,00	11.89	%	Rp.65.918.00,00	12.41	%	Rp.50.992.00,00	12.93	%	Rp.10.155.00,00	12.97	%	Rp.157.570.000,00	13	%	Rp.241.000.000,00	13	%	Rp.525.635.000,00
			03.04.05.01	204 Terulang alat UTTP	Jumlah alat UTTP yang ditera	65	Unit	Rp.22.100,00	70	Unit	Rp.24.610,00	75	Unit	Rp.26.615,00	85	Unit	Rp.10.155,00	100	Unit	Rp.32.100,00	120	Unit	Rp.35.000,00	450	Unit	Rp.128.480,00

			03.04.05.02	205 Pengadaan peralatan dan sarana metrologi legal	Jenis alat yang diadakan	0	Jenis	Rp.0.00	0	Jenis	Rp.0.00	0	Jenis	Rp.0.00	0	Jenis	Rp.0.00	1	Jenis	Rp.93,000,000.00	3	Jenis	Rp.10,000,000.00	4	Jenis	Rp.193,000,000.00
			03.04.05.03	207 Sosialisasi perda retribusi tera/tera ulang alat UTTP	Tertaksanya sosialisasi perda retribusi dan tera alat UTTP	0	Kali/tahun	Rp.0.00	1	Kali/tahun	Rp.17,170,000.00	0	Kali/tahun	Rp.0.00	0	Kali/tahun	Rp.0.00	1	Kali/tahun	Rp.11,935,000.00	1	Kali/tahun	Rp.15,000,000.00	2	Kali/tahun	Rp.44,105,000.00
			03.04.05.04	208 Verifikasi standar kerja alat tera alat UTTP	Jumlah alat tera yang standarisasi	0	Jenis	Rp.0.00	0	Jenis	Rp.0.00	0	Jenis	Rp.0.00	0	Jenis	Rp.0.00	10	Jenis	Rp.20,535,000.00	10	Jenis	Rp.35,000,000.00	20	Jenis	Rp.55,535,000.00
			03.04.05.05	209 Monitoring dan pengawasan alat UTTP	Jumlah Pengawasan	0	Kali/tahun	Rp.0.00	0	Kali/tahun	Rp.0.00	0	Kali/tahun	Rp.0.00	0	Kali/tahun	Rp.0.00	0	Kali/tahun	Rp.0.00	4	Kali/tahun	Rp.30,000,000.00	4	Kali/tahun	Rp.30,000,000.00
			03.04.05.06	211 Penyuluhan perlindungan konsumen dan pos ukur ulang non BDKT	Teraksanya penyuluhan dan pos ukur ulang	1	Kali	Rp.16,250,000.00	2	Kali	Rp.24,138,000.00	2	Kali	Rp.24,377,000.00	0	Kali	Rp.0.00	0	Kali	Rp.0.00	2	Kali	Rp.26,000,000.00	6	Kali	Rp.74,515,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap	03.04.06	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10.39	%	Rp.1.515,000,00	11.89	%	Rp.1.671,840,000,00	12.41	%	Rp.1.915,250,000,00	12.93	%	Rp.2.667,418,000,00	12.97	%	Rp.1.523,400,000,00	13	%	Rp.1.600,000,00	13	%	Rp.9.377,908,000,00

mi yang berkualitas	tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	ap PDRB		dan Prasarana Perdagangan																						
			03.04.06.01	215 Pembangunan sarana distribusi perdagangan/pasar tradisional	Terbangunnya pasar tradisional kecamatan	3	Unit	Rp.1.515,000.00	3	Unit	Rp.1.671,840,000.00	3	Unit	Rp.1,915,250,000.00	2	Unit	Rp.1,303,550,000.00	2	Unit	Rp.1,523,400,000.00	2	Unit	Rp.1,600,000.00	12	Unit	Rp.8.014,040,000.00
			03.04.06.03	219 Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal	Tersedianya Gedung Metrologi Legal dan Perlengkapannya	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	1	Unit	Rp.1,363,868,000.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	1	Unit	Rp.1,363,868,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Pertumbuhan Industri	03.05.02	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan Industri	3.14	%	Rp.94.000.000,00	1.35	%	Rp.110.026.000,00	1.45	%	Rp.96.407.000,00	1.55	%	Rp.46.785.000,00	0.15	%	Rp.66.750.000,00	0.15	%	Rp.10.000.000,00	7.79	%	Rp.419.968.000,00
			03.05.02.01	225 Temu Usaha Industri	Jumlah temu usaha industry	40	unit	Rp.18,000,000.00	40	unit	Rp.20,770,000.00	30	unit	Rp.13,125,000.00	30	unit	Rp.12,650,000.00	30	unit	Rp.8,650,000.00	60	unit	Rp.25,000,000.00	200	unit	Rp.80,195,000.00

			03.05.02.02	227 Penyediaan sarana promosi industri kecil dan menengah	Jumlah sarana promosi	2	lokasi	Rp.33,000,000.00	2	lokasi	Rp.36,800,000.00	2	lokasi	Rp.40,168,000.00	2	lokasi	Rp.24,260,000.00	2	lokasi	Rp.39,650,000.00	2	lokasi	Rp.40,000,000.00	2	lokasi	Rp.180,878,000.00
			03.05.02.05	233 Koordinasi teknis dewan kerajinan nasional	Frekuensi koordinasi dewan kerajinan nasional	2	kali	Rp.43,000,000.00	3	kali	Rp.52,456,000.00	2	kali	Rp.43,114,000.00	1	kali	Rp.9,875,000.00	1	kali	Rp.18,450,000.00	2	kali	Rp.35,000,000.00	9	kali	Rp.158,895,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Cakupan bina kelompok pengrajin	02.12.04	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Cakupan bina kelompok pengrajin	30.77	%	Rp.177,250,000.00	12	%	Rp.280,770,000.00	12	%	Rp.311,882,000.00	12	%	Rp.131,575,000.00	7	%	Rp.251,020,000.00	7	%	Rp.263,100,000.00	80.77	%	Rp.1.238.347,000.00
			02.12.04.01	257 Gelar produk industri dan kerajinan kab merangin	Jumlah gelar produk	3	kali	Rp.97,500,000.00	3	kali	Rp.141,455,000.00	4	kali	Rp.199,650,000.00	4	kali	Rp.79,650,000.00	4	kali	Rp.205,575,000.00	4	kali	Rp.200,000,000.00	19	kali	Rp.826,330,000.00
			02.12.04.02	258 Monitoring Usaha Industri	jumlah monitor	2	Kali/Bulan	Rp.22,500,000.00	3	Kali/Bulan	Rp.31,205,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.13,646,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.3,500,000.00	1	Kali/Bulan	Rp.6,900,000.00	2	Kali/Bulan	Rp.15,600,000.00	10	Kali/Bulan	Rp.70,851,000.00

			02.12.04.03	262 Souvenir produk kerajinan	jumlah souvenir	55	Paket	Rp.57,250.00	100	Paket	Rp.108,110,000.00	90	Paket	Rp.98,586,000.00	48	Paket	Rp.48,425,000.00	60	Paket	Rp.33,725,000.00	60	Paket	Rp.40,000,000.00	358	Paket	Rp.328,846,000.00
			02.12.04.05	267 Penyusunan database IKM	Tersedianya database IKM yang didata	1392	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	0	Unit	Rp.0.00	1667	Unit	Rp.4,820.00	1701	Unit	Rp.7,500.00	1701	Unit	Rp.12,320,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Jumlah Sentra IKM	03.05.03	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perindustrian	Jumlah Sentra IKM	26	Sentra	Rp.0.00	0	Sentra	Rp.0.00	0	Sentra	Rp.0.00	1	Sentra	Rp.1.353,675,000.00	0	Sentra	Rp.0.00	1	Sentra	Rp.0.00	28	Sentra	Rp.1.353,675,000.00
			03.05.03.02	242 Revitalisasi sentra IKM	Jumlah yang dibangun	0	Kawasan	Rp.0.00	0	Kawasan	Rp.0.00	0	Kawasan	Rp.0.00	1	Kawasan	Rp.1.353,675,000.00	0	Kawasan	Rp.0.00	0	Kawasan	Rp.0.00	1	Kawasan	Rp.1.353,675,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	03.05.01	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	7.41	%	Rp.95,200.00	7.50	%	Rp.112,725,000.00	7.59	%	Rp.82,645,000.00	7.66	%	Rp.52,750,000.00	7.76	%	Rp.33,565,000.00	7.85	%	Rp.40,000,000.00	7.85	%	Rp.321,685,000.00

			03.05.01.01	222 Bantuan Peralatan Industri	Tersalurnya bantuan peralatan kepada IKM	8	IKM	Rp.95,200,000.00	10	IKM	Rp.112,725,000.00	6	IKM	Rp.82,645,000.00	5	IKM	Rp.52,750,000.00	3	IKM	Rp.33,565,000.00	3	IKM	Rp.40,000,000.00	27	IKM	Rp.321,685,000.00
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiskal daerah	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	03.05.04	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	7.41	%	Rp.0,00	7.50	%	Rp.57,137,000,00	7.59	%	Rp.0,00	7.66	%	Rp.0,00	7.76	%	Rp.0,00	7.85	%	Rp.50,000,000,00	7.85	%	Rp.107,137,000,00
			03.05.04.01	248 Pelatihan teknis produksi	Jumlah Peserta yang Dilatih	0	orang	Rp.0.00	20	orang	Rp.57,137,000.00	0	orang	Rp.0.00	0	orang	Rp.0.00	0	orang	Rp.0.00	40	orang	Rp.50,000,000.00	60	orang	Rp.107,137,000.00

BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Termuat Dalam Dokumen Perubahan RPJMD 2014-2018

Indikator kinerja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian RPJMD sebagaimana table 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah usaha mikro kecil	10.834 Unit	315 Unit	265 Unit	85 Unit	30 Unit	73 Unit	11.602 Unit
2	Jumlah BPR/LKM aktif	3 Unit	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	0	6 Unit
3	Persentase koperasi aktif	56,88 %	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1%	63,88%
4	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10,39 %	11,89 %	12,41 %	12,93 %	12,97 %	13%	13%
5	Pertumbuhan Industri	3,14 %	1,35 %	1,45 %	1,55 %	0,15 %	0,15 %	7,79%
6	Cakupan bina kelompok pengrajin	30,77 %	12%	12%	12%	7%	7%	80,77%
7	Jumlah sentra IKM	26 Sentra	0	0	1 Sentra	0	1 Sentra	28 Sentra
8	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	7,41%	7,50%	7,59%	7,66 %	7,76%	7,85%	7,85%

6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas KUKMPP dan Program Kerja Yang Mendukung IKU Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Merangin telah menyusun perubahan RPJMD Kabupaten Merangin yang didalamnya juga mencakup tujuan, sasaran dan target indikator kinerja Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 sesuai dengan point-point misi kepala daerah terpilih.

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin berada pada **Misi IV: Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan UKM.** Secara lengkap matrik tujuan, sasaran dan target indikator kinerja Kabupaten Merangin, khususnya Misi IV dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2.1
Matrik tujuan, sasaran dan target indikator kinerja Misi IV
Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS											
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja Kondisi Awal	Capain Kinerja					Capaian Kinerja Kondisi Akhir
						2014	2015	2016	2017	2018	
4	MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN UKM	Meningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan ekonomi	6,47%	6,95%	5,48%	6,56%	5,50%	5,75%	5,75%

Sesuai dengan dengan tabel diatas, Misi IV mempunyai dua tujuan dan sasaran, namun demikian Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin bertanggung jawab pada satu tujuan dan sasaran saja yakni **Tujuan : Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** dan **Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi** dengan **indikator kinerja (out come) : Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin sebagai salah OPD yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian maka sudah tentu ikut bertanggung jawab dalam upaya pencapaian target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin. Sesuai dengan arah dan tujuan dari penetapan indikator kinerja, maka ada beberapa indikator kinerja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin yang bersentuhan secara langsung dengan upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Keseluruhan indikator kinerja dan program Dinas KUKMPP yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi disajikan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 6.2.2
Indikator Kinerja dan Program Dinas KUKMPP
Yang Mendukung Laju Pertumbuhan Ekonomi

MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN UKM									
TUJUAN: Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas		SASARAN : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi				INDIKATOR KINERJ (OUT COME): Laju Pertumbuhan Ekonomi			
No	Indikator Kinerja Dinas KUKMPP Yang Mendukung Pencapaian Laju Perumbuhan Ekonomi	Capaian Kondisi Awal	Target Capaian					Capaian Kondisi Akhir	Program Yang Dilaksanakan
			2014	2015	2016	2017	2018		
4.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10,39%	11,89%	12,41%	12,93%	12,97%	13%	13%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 4. Program pengembangan UTP Kemetrolgian 5. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan
8.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDBR	7,41%	7,50%	7,59%	7,66 %	7,76%	7,85%	7,85%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi 2. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Dari tabel diatas, terlihat ada dua indikator kinerja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin yang mendukung pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi. Secara lebih spesifik, hubungan antara Indikator Kinerja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dengan pencapaian target Laju pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha yang termasuk sebagai elemen yang dihitung dalam perhitungan PDRB. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kontribusi sektor perdagangan.

2. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sama dengan sektor perdagangan, sektor industri juga merupakan salah satu lapangan usaha yang termasuk dalam perhitungan PDRB. Dengan demikian, kontribusi sektor industri juga akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Oleh karenanya, Renstra Perubahan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta menjadi pelaksana pencapaian target-target visi misi RPJMD 2014-2018.

Disamping itu pula dokumen Perubahan Renstra juga sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin serta dapat juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran pegawai Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya guna mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Bangko, Januari 2017

Kepala Dinas Koperasi dan UKM,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin



Drs. JUNAIDI, S.IP. ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19650608 199001 1 002

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 - 2018



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MERANGIN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (KUKMPP) Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tersusunnya dokumen Revisi Renstra ini tidak lain merupakan buah kerja keras bersama untuk mewujudkan visi "Menjadikan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin sebagai Penggerak Perekonomian Rakyat Melalui Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah" serta menjadikan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih solid, responsif, handal dan professional dimasa mendatang.

Selain itu, Revisi Renstra tahun 2014-2018 ini juga dilakukan sebagai wujud komitmen Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin untuk menyediakan dokumen perencanaan kinerja beserta target-target capaian selama lima tahun yang lebih komprehensif, rasional dan responsif. Komprehensif, rasional dan responsif yang dimaksud adalah, perencanaan kinerja yang benar-benar mencakup seluruh aspek tugas dan tanggung jawab, dan memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia serta pendanaan, serta menyesuaikan dengan kondisi riil yang ada ditengah masyarakat.

Kami menyadari penyusunan dokumen Revisi Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, disana sini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun demikian hasil dari Revisi Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin sebagai instansi Pemerintah Daerah guna meningkatkan

akuntabilitas dan kinerjanya dengan tujuan akhir, yakni terciptanya pemerintah yang baik (*good governance*).

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Revisi Renstra ini, kami ucapkan terima kasih, semoga dokumen Revisi Renstra ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dan seluruh masyarakat serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi berkenaan dengan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin.

Bangko, Januari 2017

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Merangin



Drs. JUNAIDI, S.IP. ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19650608 199001 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi OPD.....	14
2.2 Sumber Daya OPD.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	26
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	32
3.2 Telaahan Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi.....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	37
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	39

	4.1 Visi dan Misi OPD.....	39
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	40
	4.3 Strategi dan Kebijakan OPD.....	42
BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	46
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	72
	6.1 Indikator Kinerja Yang Termuat Dalam Dokumen Perubahan RPJMD 2014-2018.....	72
	6.2 Indikator Kinerja Utama Dinas KUKMPP dan Program Kerja Yang Mendukung KU Kabupaten.....	73
BAB VII	: PENUTUP.....	78

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.2.1.1 Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
- Tabel 2.2.1.2 Keadaan pegawai berdasarkan jenis dan tingkat jabatan
- Tabel 2.2.1.3 Keadaan pegawai berdasarkan golongan
- Tabel 2.2.2.1 Keadaan Aset dan Peralatan Kerja Dinas KUKMPP
- Tabel 2.3.1 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin Tahun 2009-2013
- Tabel 2.3.2 Jumlah pagu dan realisasi anggaran belanja langsung Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin Tahun 2009-2013
- Tabel 3.3 Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya
- Tabel 3.4 Permasalahan pelayanan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin berdasarkan telaahan RT/RW beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya
- Tabel 4.1.1 Ringkasan visi dan misi Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin
- Tabel 4.2.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin
- Tabel 4.3 Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin
- Tabel 5.1 Rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin tahun 2014-2018

- Tabel 6.1 Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- Tabel 6.2.1 Matrik tujuan, sasaran dan target indikator kinerja Misi IV Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018
- Tabel 6.2.2 Indikator Kinerja dan Program Dinas KUKMPP yang mendukung Laju Pertumbuhan Ekonomi



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KOPERASI DAN UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

JL. SUDIRMAN KM. 2. ☎ (0746) 21013 FAX (0746) 21013

BANGKO

KODE POS 37314

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2014-2018**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang :
- a. Bahwa terbitnya regulasi tentang perangkat daerah berimplikasi pada perubahan struktur organisasi, nama serta tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - b. Bahwa perubahan struktur organisasi, nama serta tugas dan fungsi perangkat daerah mendorong pemerintah Kabupaten Merangin melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018);
 - c. Bahwa perubahan RPJMD Kabupaten Merangin, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin tahun 2014-2018;
 - d. Bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
13. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

14. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Penegembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 07);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
29. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
30. Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018
- KESATU : Perubahan Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin untuk periode 5 (lima) tahun;
- KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Strategis adalah sebagaimana terlampir sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 berfungsi sebagai :

- a. Acuan bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang koperasi dan UKM, perdagangan dan perindustrian;
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi program dan kegiatan;
- c. Memudahkan Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program/kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n g k o
Pada tanggal : 15 Januari 2017

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Merangin



Drs. JUNADI, S.IP. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650608 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kab. Merangin
2. Inspektur Inspektorat Kab. Merangin
3. Kabag Organisasi Setda Merangin
4. Arsip